



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG
BARAT
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGI
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2023 - 2026**

2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, maka Perubahan Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dapat selesai disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat 2023-2026 dan antisipasi terhadap kebutuhan pembangunan di masa mendatang.

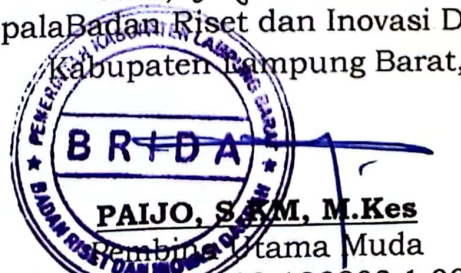
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat disusun dengan berdasarkan pada pencapaian tujuan Badan Riset dan Inovasi Daerah yang berorientasi pada hasil yang sudah mempertimbangkan kekuatan, kelemahan dan besarnya peluang yang ada sekaligus melihat tantangan yang dihadapi, serta memprediksi jawaban atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan teknologi informasi dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dan daya saing daerah Kabupaten Lampung Barat di tingkat nasional.

Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026 merupakan pedoman bagi seluruh jajaran struktural dan fungsional yang akan di implementasikan dalam bentuk program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dari Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah dan tujuan dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Semoga Dokumen Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah ini dapat meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan inovasi daerah dalam mencapai tujuan organisasi.

Liwa, 8 Januari 2024
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Lampung Barat,



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan Pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang mana dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu di dukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Lembaga Pemerintah/Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdiri dari tahapan sebagai berikut : persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Pembentukan institusi yang menangani kegiatan Penelitian dan Pengembangan tersebut merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dalam menunjang kebijakan pembangunan daerah. Oleh karenanya, Badan Riset sebagai institusi penelitian dan pengembangan di daerah harus mampu mengemban misi sebagai lembaga yang mampu memberikan masukan berdasarkan sebuah kajian kepada Bupati selaku Kepala Daerah, dalam membuat berbagai rumusan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.

Penguatan terhadap lembaga Penelitian dan Pengembangan Kabupaten sebagaimana tersebut di atas perlu dilakukan mengingat perannya sebagai *think tank* Kepala Daerah dalam membuat berbagai rumusan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik. Selain

dengan melakukan *review* terhadap struktur kelembagaan, reorientasi terhadap program litbang ke depan mutlak harus dilakukan agar peran yang diemban dapat dijalankan dengan baik dan benar. Salah satu langkah untuk melakukan reorientasi terhadap program ke depan tersebut adalah dengan melakukan berbagai penyempurnaan terhadap rencana strategis baik program internal maupun program eksternalnya dengan tidak meninggalkan rambu-rambu seperti yang diamanatkan dalam dokumen perencanaan pembangunan kabupaten, provinsi maupun nasional.

Menurut Friedman (1993) perencanaan merupakan penghubung antara teori dan tindakan. Perencanaan dianggap sebagai cara profesional yang menghubungkan dunia ilmiah dengan tindakan nyata dalam ranah publik. Perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana strategis sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Renstra OPD adalah dokumen perencanaan BRIDAKabupaten Lampung Barat untuk periode 4 (empat) tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023- 2026 dan bersifat indikatif. Rencana Strategis BRIDA merupakan penjabaran rencana kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan inovasi yang diemban oleh BRIDAKabupaten Lampung Barat adalah memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan berdasarkan hasil penelitian atau kajian ilmiah dalam seluruh aspek.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini, adalah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005 - 2025;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud di susunnya dokumen Perubahan Renstra adalah sebagai pedoman dan acuan perencanaan di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah untuk penyusunan dan penetapan rencana lima tahunan, rencana kerja tahunan, pemantauan dan evaluasi capaian kinerja tahunan dalam kurun waktu 2023 - 2026.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya dokumen Renstra BRIDA Kabupaten Lampung Barat 2023 – 2026 yang menjadi rencana kerja dan sebagai indikator evaluasi kinerja lima tahunan Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- b. Merumuskan target kinerja sebagai dukungan pencapaian target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023 – 2026;
- c. Sebagai pedoman bagi aparatur di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 – 2026 berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
1.1.	LATAR BELAKANG
1.2.	LANDASAN HUKUM
1.3.	MAKSUD DAN TUJUAN
1.4.	SISTEMATIKA PENULISAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN
2.1.	TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
2.2.	SUMBERDAYA
2.3.	KINERJA PELAYANAN
2.4.	TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1.	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN
3.5.	PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1. TUJUAN
	4.2. SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN
	4.1. STRATEGI
	4.2. ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP
LAMPIRAN	

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan , serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah.

Badan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila, dengan fungsinya adalah :

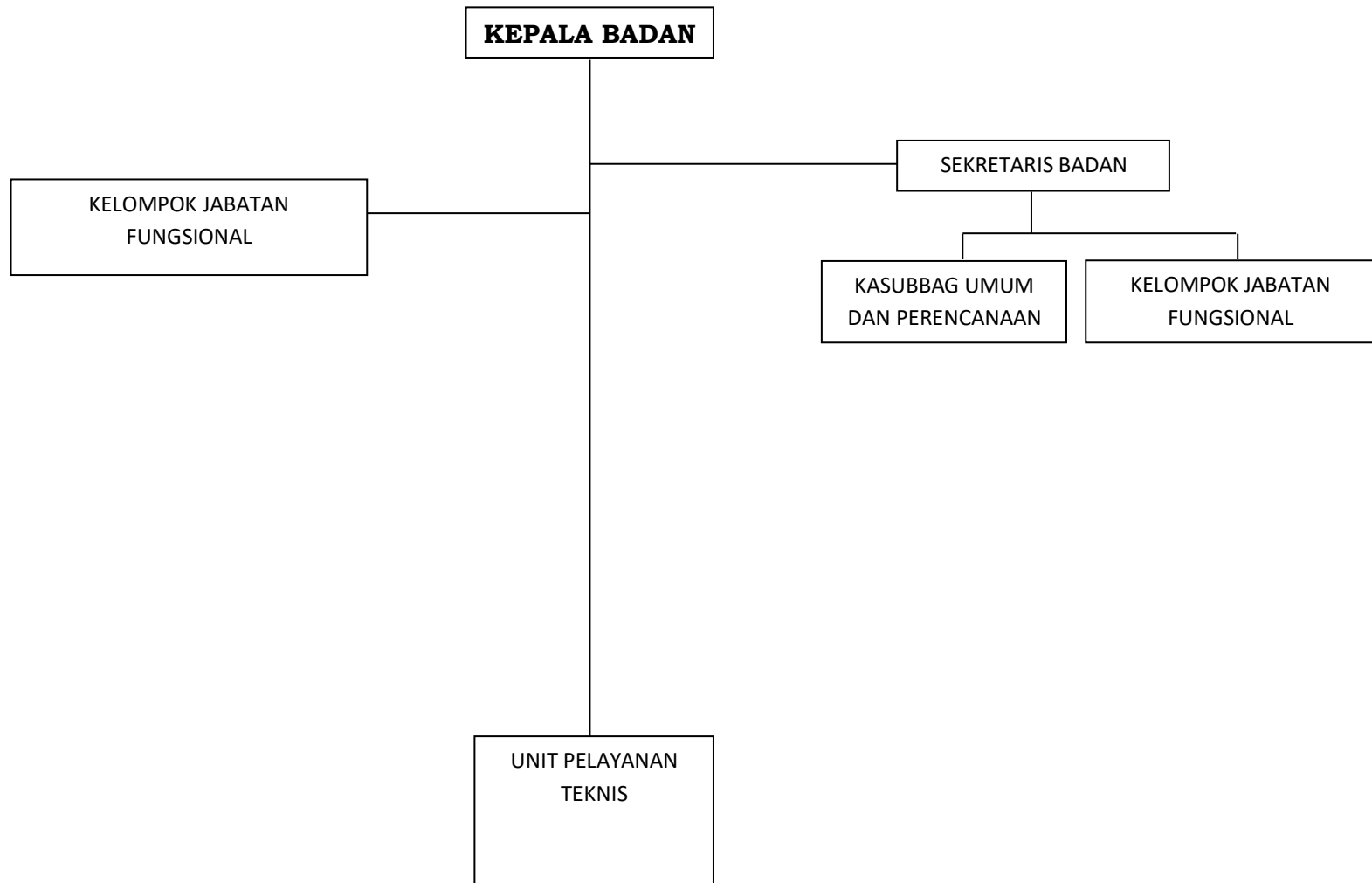
- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan,serta Inovasi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedomanpada nilai Pancasila;
- b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang riset

- dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
 - e. pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, Penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
 - f. pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - g. koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi Penelitian lainnya di daerah;
 - h. koordinasi system ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - i. pelaksanaan administrasi badan;dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat (Gambar 2.1) sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Unit Pelaksana Teknis Badan.

GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASIBADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



Sebagaimana gambar 2.1 diatas, masing-masing unsur di Badan Penelitian dan pengembangan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Sekretariat

- Tugas

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dalam internal Badan dan pemberian dukungan teknis administrasi kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah.

- Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan perencanaan, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- merencanakan, mengkoordinasikan pengadaan infrastruktur riset meliputi seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan riset baik dalam bentuk bangunan, peralatan, lahan, koleksi, dan data serta mengkoordinasikan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset oleh Kelompok Jabatan Fungsional Substansi.
- pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi; dan
- pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;

b. Sub Bagian Umum dan Perencanaan

- Tugas

Sub Bagian Umum dan Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu pelaksanaan penjabaran kebijakan teknis dibidang umum, kepegawaian dan perencanaan.

- Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana, program dan anggaran kerja, kelembagaan dan sumberdaya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di lingkungan Badan;
- Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
- Melakukan penyiapan bahan pelayanan administrasi; dan
- Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Sedangkan untuk Jabatan Fungsional, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, masing-masing unsur memiliki tugas :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Invensi dan Inovasi Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan di daerah, dalam melaksanakan tugas BRIDA menyelenggarakan fungsi :
 - pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan dibidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi dibidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan, Kerjasama Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan di daerah;

- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi riset dan inovasi, kerja sama Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan inovasi di daerah;
 - pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di daerah;
 - koordinasi sistem Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan di daerah; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, Inovasi dan Inovasi Bidang Pembangunan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah, dalam melaksanakan tugas BRIDA menyelenggarakan fungsi :
- pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, inovasi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan dibidang Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, inovasi dan inovasi dibidang Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kerjasama Bidang Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, inovasi dan inovasi Bidang Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah;
 - Pemberian bimbingan teknis dan supervisi riset dan inovasi, kerja sama Bidang Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan inovasi di daerah;
 - pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di daerah;

- koordinasi sistem Bidang Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan merupakan kelompok jabatan dibawah sekretariat,mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan administrasi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset.

2.2. SUMBERDAYA

1.2.1.Kepegawaian

Sumberdaya Manusia merupakan komponen penting dalam suatu organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi nya, Badan Riset dan Inovasi Daerah memiliki sumberdaya manusia dengan jumlah 81 orang, dengan rasio pegawai 30 orang berada di Kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah, dan 51 orang berada dikantor UPT Kebun Raya Liwa.

Sumberdaya Manusia BRIDA terdiri dari 25 orang PNS, 2 CPNS dan 54 orang tenaga honorer/TKS. Secara Distribusi, Jumlah pegawai BRIDA dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Distribusi Pegawai BRIDA

No	Lokasi	Jumlah Pegawai	
		PNS/CPNS	Honorer/TKS
1.	Kantor BRIDA	25	5
2.	Kantor UPT Kebun Raya Liwa	2	49

Badan Riset dan Inovasi Daerah memiliki 4 Jabatan Struktural dan 6 Jabatan Fungsional Penyetaraan, yaitu:

- a. 1 (satu) orang Kepala, Eselon II.a
- b. 1 (satu) orang Sekretaris, Eselon III
- c. 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian/Sub Bidang, Eselon IV.a
- d. 1 (satu) orang Kepala TU UPT, Eselon IV.b
- e. 2 (dua) orang Analis Data Ilmiah Ahli Madya
- f. 1 (satu) orang Peneliti Ahli Muda

- g. 2 (dua) orang Analis Data Ilmiah Ahli Muda
- h. 1 (satu) orang Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda
- i. 1 (satu) orang Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Muda
- j. 1 (satu) orang Analis Pemanfaatan IPTEK Ahli Muda

Berdasarkan Kepangkatan/Golongan, PNS pegawai Badan Riset dan Inovasi Daerah terlihat seperti dalam Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Jumlah PNSBerdasarkan Kepangkatan/Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	IV.c	1
2.	IV.b	2
3.	IV.a	2
4.	III.d	4
5.	III.c	3
6.	III.b	3
7.	III.a	7
8.	II.d	1
9.	II.c	2
9.	II.b	1
10.	II.a	1

Tingkat Pendidikan pegawai PNS Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	%
1.	S2	4	15
2.	S1	17	63
3.	Diploma	2	7
4.	SMA	4	15

1.2.2. Sarana Dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Riset dan Inovasi Daerah dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung seperti Gedung Kantor, Kendaraan Dinas, dan sarana pendukung lainnya. Secara umum daftar sarana dan prasarana Badan Riset dan Inovasi Daerah terlihat sebagaimana Tabel 2.3

Tabel 2.4
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
BRIDA Kabupaten Lampung Barat

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Bangunan Gedung kantor permanen	1 unit	baik
2.	Minibus	2 unit	baik
3.	Kursi	69 unit	35 unit dalam kondisi rusak
4.	Meja	51 unit	23 unit dalam kondisi rusak
5.	Filing Cabinet	5 unit	4 unit dalam kondisi rusak
6.	Lemari Arsip	5 unit	1 unit dalam kondisi rusak
7.	Alat penghancur kertas	1 unit	baik
8.	Brankas	1 unit	baik
9.	Camera Electronic	2 unit	rusak
10	Kompas geologi	1 unit	baik
11	Laptop	5 unit	3 unit dalam kondisi baik
12	PC Unit	9 unit	2 unit dalam kondisi baik
13	Printer	5 unit	3 unit dalam kondisi baik
14	Scanner	1 unit	baik
15	Plotter	1 unit	baik
16	Rol Meter	1 unit	baik

Selain asset diatas, ada asset yang tidak berwujud berupa website kelitbangan.

2.3. KINERJA PELAYANAN

Obyek (Sasaran Utama) pelayanan adalah Masyarakat Kabupaten Lampung Barat, Perangkat Daerah se- Kabupaten Lampung Barat, Kecamatan se- Kabupaten Lampung Barat, Perguruan Tinggi. Berdasarkan amanat Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Di Daerah, disebutkan bahwa penyelenggaraan Riset serta Invensi dan Inovasi dilakukan oleh BRIDA. Penyelenggaraan Riset dapat juga dilakukan oleh lembaga riset swasta, badan usaha, perguruan tinggi, masyarakat, dan

lembaga asing yang telah mendapatkan izin namun tetap harus bersinergi dengan BRIDA.

Riset yang dapat diselenggarakan meliputi :

- a. Penelitian, ditujukan untuk :
 - Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
 - Perbaikan tata kelola pemerintahan daerah
 - Pemberdayaan dan peran serta masyarakat
 - Peningkatan daya saing daerah
 - Peningkatan kesejahteraan masyarakat
- b. Pengembangan, dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban
- c. Pengkajian, dilakukan melalui analisis dan perekayasa dengan kegiatan perekayasa meliputi :
 - Pengujian
 - Pengembangan teknologi
 - Rancang bangun
 - Pengoperasian
- d. Penerapan, ini wajib dilakukan berbasis penelitian, pengembangan dan/atau pengkajian. Dapat dilakukan melalui :
 - Alih teknologi
 - Intermediasi teknologi
 - Difusi ilmu pengetahuan dan teknologi
 - Komersialisasi teknologi

Selain Riset, BRIN juga mendorong Pemerintah Daerah dalam pengembangan invensi dan inovasi. Pengembangan invensi dan inovasi berupa fasilitasi pemanfaatan, adopsi, inkubasi, kemitraan, penguatan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan daerah, promosi, dan pemanfaatan hasil Invensi dan Inovasi dalam program pembangunan secara berkelanjutan. Invensi dan Inovasi ditujukan untuk :

- Menjadi solusi permasalahan daerah
- Memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika

- Menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat
- Peningkatan pelayanan publik

Kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2018 - 2022 ditandai dengan 2 (dua) indikator, yaitu :

- a. Jumlah hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam mendukung kinerja pemerintah daerah
- b. Indeks Inovasi Daerah

Dengan pencapaian kinerja pelayanan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Lampung Barat

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Jumlah hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam mendukung kinerja pemerintah daerah				6	10	12	12	12	6	10	16	12	proses pelaksanaan	100	100	133	100	
2	Indeks Inovasi Daerah				Inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif	Sangat inovatif	proses pelaksanaan	100	100	100	100	

Dengan realisasi anggaran terlihat seperti dalam Tabel 2.5 sebagai mana berikut :

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke - (dalam 1.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke (dalam 1.000)					Rasio antara realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	681.153	772.944	603.548	2.333.657	2.371.709	610.288	720.018	578.905	2.167.421	proses	90	93	96	93			
Program Penelitian dan Pengembangan	856.340	1.515.988	641.700	888.923	861.452	650.075	1.503.920	635.690	884.313	proses	76	99	99	99			
Program Pengembara Kebun Raya	1.505.067	1.480.015	870.162	-	-	1.428.525	1.384.128	865.654	-		95	94	99				

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Lampung Barat merupakan daerah hulu Provinsi Lampung, dengan luas wilayah hutan sekitar 59,25% (126.956,27 hektar) dari total luas wilayah Kabupaten Lampung Barat. Terdiri dari Hutan Lindung dan

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Sementara itu, kawasan budidaya hanya sekitar 40,75% (87.318,28 hektar). Dengan adanya pertumbuhan penduduk serta aktifitas ekonomi masyarakat, hal ini menimbulkan berbagai dampak berupa dampak ekonomi, sosial dan ekologi di Kabupaten Lampung Barat. Dengan kondisi seperti itu, diperlukan kajian-kajian sebagai dasar perumusan dan kebijakan pembangunan Kab. Lampung Barat kedepan.

Selain perlunya Riset, juga diperlukan inovasi-inovasi dalam mengatasi tantangan pembangunan seperti pengembangan Geopark sebagai salah satu bentuk komitmen Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi.

Berdasarkan hal diatas, ada beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah, yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- Hasil Penelitian dan Pengembangan belum ditindaklanjuti dan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan
- SDM BRIDA masih kurang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas (belum memiliki fungsional peneliti) serta belum memiliki dewan riset
- Perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat, namun kelembagaan yang menaungi belum memadai sarana dan prasarana pendukungnya
- Kompleksnya permasalahan di Kabupaten Lampung Barat baik dari aspek sosial, ekonomi, ekologi yang memerlukan penelitian dan pengembangan
- Rendahnya implementasi hasil penelitian di tingkat lapangan
- Belum optimalnya pengembangan teknologi tepat guna
- Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan dinilai belum dapat mendukung kebijakan yang akan dilakukan oleh OPD lain

b. Peluang

- Ditetapkannya Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.

- Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Pengalokasian anggaran melalui APBD.
- Kesadaran perlunya BRIDA dalam menentukan kebijakan daerah dan pengembangan potensi daerah
- Kerjasama di Bidang penelitian dan pengembangan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga penelitian dan Pengembangan lainnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Mengacu pada Tugas dan Fungsinya, Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat memiliki peranan penting dalam melakukan penelitian dan pengembangan. Akan tetapi, hal ini tidak akan berjalan dengan lancar jika tidak didukung oleh Sumberdaya yang memadai. Berdasarkan capaian kinerja selama lima tahun, ada beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam menjalankan tupoksi nya. Permasalahan itu dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. Hasil Penelitian dan Pengembangan belum ditindaklanjuti dan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan
- b. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan dinilai belum dapat mendukung kebijakan yang akan dilakukan oleh OPD lain
- c. Belum tersediannya Rencana Induk dan Peta Jalan yang menjadi acuan dalam melakukan kegiatan Riset;
- d. Pejabat fungsional sesuai dengan kepakaran baik secara kualitas maupun kuantitas masih terbatas
- e. Terbatasnya sarana dan prasarana BRIDA dalam menjalankan tupoksi
- f. Publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan BRIDA di kalangan pemerintah dan masyarakat masih terbatas, sehingga belum berkontribusi positif dan memberikan nilai strategis dalam perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan daerah
- g. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan penerapan/pemanfaatan hasil riset
- h. Belum optimalnya penyebaran informasi hasil penelitian (diseminasi), advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi permasyarakatan IPTEK

- i. Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk penelitian dan pengembangan.

1.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat disusun dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal Badan. Telaah terhadap faktor internal, memberikan gambaran tentang potensi dan hambatan pelayanan SKPD, sedangkan telaah terhadap faktor eksternal memberikan gambaran tentang peluang dan ancaman bagi SKPD untuk 4(empat) tahun mendatang.

a. Faktor Internal

1. Potensi (S)

- Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Pengalokasian anggaran melalui APBD.
- Tersedianya struktur organisasi BRIDA yang jelas
- Tersedianya sumberdaya aparatur

2. Kelemahan (W)

- Sarana dan prasarana belum memadai
- Pendanaan belum memadai
- Sumberdaya aparatur belum memadai
- Tenaga fungsional masih terbatas
- Belum mempunyai pengalaman yang luas sebagai lembaga litbang dikarenakan baru berjalan dari tahun 2017 ini.
- Belum optimalnya distribusi data sebagai bahan masukan penyusunan laporan hasil penelitian/kajian;
- Belum adanya Dewan Riset Daerah

b. Faktor Eksternal

1. Peluang (O)

- Perkembangan IPTEK yang semakin maju
- Kesadaran perlunya Badan Riset dan Inovasi Daerah di Daerah
- Penerapan otonomi daerah dan era globalisasi

2. Tantangan (T)

- Komitmen untuk menjadikan Riset sebagai pilar terdepan masih dalam tataran normatif

- Kompleknya permasalahan yang harus diselesaikan di Lampung Barat
- Kondisi Lampung Barat yang luas wilayahnya 61,5% adalah kawasan hutan.
- Kurangnya koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan bidang Riset
- Kebijakan pembangunan masih dipengaruhi oleh dinamika politik.

Penentuan isu-isu strategis berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor – faktor ini dibuat matriks untuk menganalisa isu-isu strategi. Lebih rinci, matriks perumusan isu-isu strategi disajikan dalam Tabel 3.1

TABEL 3.1 MATRIKS PERUMUSAN ISU-ISU STRATEGI

Faktor Internal	Potensi (S)	Kelemahan (W)
Faktor Eksternal	1. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Pengalokasian anggaran melalui APBD. 2. Tersedianya struktur organisasi Brida yang jelas 3. Tersedianya sumberdaya aparatur	1. Sarana dan prasarana belum memadai 2. Pendanaan belum memadai 3. Sumberdaya aparatur belum memadai 4. Fungsional peneliti masih terbatas 5. Belum mempunyai pengalaman yang luas sebagai lembaga litbang dikarenakan baru berjalan tahun 2017 ini. 6. Belum optimalnya distribusi data sebagai bahan masukan penyusunan laporan hasilpenelitian/kajian; 7. Belum adanya Dewan Riset Daerah
Peluang (O)	Strategi S-O	Strategi W-O
1. Perkembangan IPTEK yang semakin maju 2. Kesadaran perlunya BRIDA di Daerah 3. Penerapan otonomi daerah dan era globalisasi	1. Peningkatan Kapasitas Riset	1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM

Tantangan (T)	Strategi S-T	Strategi W-T
1. Komitmen untuk menjadikan Riset sebagai pilar terdepan masih dalam tataran normatif 2. Kompleknya permasalahan yang harus diselesaikan di Lampung Barat baik dari masalah sosial, ekonomi, ekologi 3. Kondisi Lampung Barat yang luas wilayahnya 61,5% adalah kawasan hutan. 4. Kurangnya koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan bidang Penelitian dan Pengembangan 5. Kebijakan pembangunan masih dipengaruhi oleh dinamika politik.	1. Peningkatan Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung kebijakan daerah 2. Melakukan koordinasi antar instansi dan lembaga baik di daerah maupun pusat untuk menyelaraskan pemikiran dalam menentukan kebijakan pembangunan 3. Pengembangan Geopark sebagai salah satu bentuk dukungan Pemda untuk program konservasi kawasan hutan 4. Menjadikan Kebun Raya Liwa sebagai <i>Techno Park</i>	1. Optimalisasi penyebaran informasi hasil penelitian (diseminasi), advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi permasyarakatan IPTEK 2. Peningkatan Pelaksanaan Inovasi Daerah

Dari matriks diatas, didapat 7 (tujuh) isu strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat, sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Riset;
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM;
3. Peningkatan Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung kebijakan daerah;
4. Melakukan koordinasi antar instansi dan lembaga baik di daerah maupun pusat untuk menyelaraskan pemikiran dalam menentukan kebijakan pembangunan;
5. Pengembangan Geopark sebagai salah satu bentuk inovasi dukungan Pemda dalam melaksanakan program konservasi kawasan hutan;
6. Pengembangan Kebun Raya Liwa sebagai *Techno Park*;
7. Optimalisasi penyebaran informasi hasil penelitian (diseminasi), advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi permasyarakatan IPTEK;
8. Peningkatan Pelaksanaan Inovasi Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 4 (empat) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada permasalahan dan isu-isu strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Indikator kinerja sasaran adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 4 (empat) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target).

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam 4(empat) tahun kedepan terlihat dalam Tabel 4.1.

TABEL 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE			
				1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah		Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif/ 61	Sangat Inovatif/ 62	Sangat Inovatif/ 63	Sangat Inovatif/ 64
		Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	25	50	75	100
			Jumlah OPD yang mendapatkan Pembinaan Inovasi Daerah	28	28	28	28

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lampung Barat mencapai tujuan dan sasaran yang efektif. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program undikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Berdasarkan Tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut, tersaji dalam Tabel 5.1.

TABEL 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN RPD : Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan			
SASARAN RPD : Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan	• Meningkatkan keterpaduan, sinergitas dan sinkronisasi didalam pelaksanaan fungsi Kelitbangan • Mensinergikan seluruh aspek yang terlibat dalam peningkatan dan penerapan inovasi daerah	• Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung kebijakan daerah • Peningkatan Penguatan Inovasi Daerah • Peningkatan kerjasama kelitbangan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana, program dan kegiatan serta pendanaan Badan Riset dan Inovasi Daerah terlihat seperti dalam Lampiran 1.

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah dirumuskan, secara rinci dapat dijelaskan detail subkegiatan sebagaimana terlihat pada Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1
Detail Subkegiatan Tahun 2023 – 2026

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Detail Khusus Sub kegiatan (Tahun)			
		2023	2024	2025	2026
5.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
5.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan 11 dokumen yaitu renstra, cascading, pohon kinerja, Renja, perubahan renja, KAK, PK, PK Perubahan, Rencana Aksi, PPAS, PPAS Perubahan,	Penyusunan dokumen perencanaan 8 dokumen yaitu Renja, perubahan renja, KAK, PK, PK Perubahan, Rencana Aksi, PPAS, PPAS Perubahan,	Penyusunan dokumen perencanaan 11 dokumen yaitu renstra, cascading, pohon kinerja, Renja, perubahan renja, KAK, PK, PK Perubahan, Rencana Aksi, PPAS, PPAS Perubahan,	Penyusunan dokumen perencanaan 8 dokumen yaitu Renja, perubahan renja, KAK, PK, PK Perubahan, Rencana Aksi, PPAS, PPAS Perubahan,
5.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan dokumen RKA 1 dokumen	Penyusunan dokumen RKA 1 dokumen	Penyusunan dokumen RKA 1 dokumen	Penyusunan dokumen RKA 1 dokumen
5.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan dokumen perubahan RKA 1 dokumen	Penyusunan dokumen perubahan RKA 1 dokumen	Penyusunan dokumen perubahan RKA 1 dokumen	Penyusunan dokumen perubahan RKA 1 dokumen
5.05.01.2.01.04	Koordinasi dan	Penyusunan	Penyusunan	Penyusunan	Penyusunan

	Penyusunan DPA-SKPD	dokumen DPA 1 dokumen	dokumen DPA 1 dokumen	dokumen DPA 1 dokumen	dokumen DPA 1 dokumen
5.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan dokumen Perubahan DPA 1 dokumen	Penyusunan dokumen Perubahan DPA 1 dokumen	Penyusunan dokumen Perubahan DPA 1 dokumen	Penyusunan dokumen Perubahan DPA 1 dokumen
5.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 1 dokumen	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 1 dokumen	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 1 dokumen	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 1 dokumen
5.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi kinerja 12 laporan yaitu LKPJ, LPPD, LAKIP, Ev Renja tw 1, ev renja tw 2, ev renja tw 3, ev renja tw 4, Ev Rencana aksi tw 1, ev rencana aksi tw 2, ev rencana aksi tw 3, ev rencana aksi tw 4, laporan akhir tahun	Dokumen evaluasi kinerja 12 laporan yaitu LKPJ, LPPD, LAKIP, Ev Renja tw 1, ev renja tw 2, ev renja tw 3, ev renja tw 4, Ev Rencana aksi tw 1, ev rencana aksi tw 2, ev rencana aksi tw 3, ev rencana aksi tw 4, laporan akhir tahun	Dokumen evaluasi kinerja 12 laporan yaitu LKPJ, LPPD, LAKIP, Ev Renja tw 1, ev renja tw 2, ev renja tw 3, ev renja tw 4, Ev Rencana aksi tw 1, ev rencana aksi tw 2, ev rencana aksi tw 3, ev rencana aksi tw 4, laporan akhir tahun	Dokumen evaluasi kinerja 12 laporan yaitu LKPJ, LPPD, LAKIP, Ev Renja tw 1, ev renja tw 2, ev renja tw 3, ev renja tw 4, Ev Rencana aksi tw 1, ev rencana aksi tw 2, ev rencana aksi tw 3, ev rencana aksi tw 4, laporan akhir tahun
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
5.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN 20 orang	Penyediaan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN 20 orang	Penyediaan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN 20 orang	Penyediaan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN 20 orang
5.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen	Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen	Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen	Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen
5.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 2	Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 2	Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 2 laporan	Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran 2

		laporan	laporan		laporan
5.05.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 laporan	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 laporan	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 laporan	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 laporan
5.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
5.05.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan RKBMD 1 dokumen	Penyusunan RKBMD 1 dokumen	Penyusunan RKBMD 1 dokumen	Penyusunan RKBMD 1 dokumen
5.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan laporan penata usahaan barang milik daerah milik SKPD 2 laporan	Penyusunan laporan penata usahaan barang milik daerah milik SKPD 2 laporan	Penyusunan laporan penata usahaan barang milik daerah milik SKPD 2 laporan	Penyusunan laporan penata usahaan barang milik daerah milik SKPD 2 laporan
5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
5.05.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Penyusunan Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 dokumen	Penyusunan Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 dokumen	Penyusunan Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 dokumen	Penyusunan Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 dokumen
5.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Diklat pegawai berdasarkan tupoksinya 5 orang	Diklat pegawai berdasarkan tupoksinya 5 orang	Diklat pegawai berdasarkan tupoksinya 5 orang	Diklat pegawai berdasarkan tupoksinya 5 orang
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
5.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen listrik instalasi listrik/ penerangan kantor 1 paket berupa 15 jenis komponen listrik	Komponen listrik instalasi listrik/ penerangan kantor 1 paket berupa 15 jenis komponen listrik	Komponen listrik instalasi listrik/ penerangan kantor 1 paket berupa 15 jenis komponen listrik	Komponen listrik instalasi listrik/ penerangan kantor 1 paket berupa 15 jenis komponen listrik
5.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan	Barang cetakan dan	Barang cetakan dan	Barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan

	Penggandaan	penggandaan 1 paket yang terdiri dari 7 jenis	penggandaan 1 paket yang terdiri dari 7 jenis	1 paket yang terdiri dari 7 jenis	penggandaan 1 paket yang terdiri dari 7 jenis
5.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan berupa surat kabar 4 SKHU	Bahan bacaan berupa surat kabar 4 SKHU	Bahan bacaan berupa surat kabar 4 SKHU	Bahan bacaan berupa surat kabar 4 SKHU
5.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makan minum kunjungan tamu 300 orang	Penyediaan makan minum kunjungan tamu 300 orang	Penyediaan makan minum kunjungan tamu 300 orang	Penyediaan makan minum kunjungan tamu 300 orang
5.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah 50 kali	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah 50 kali	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah 50 kali	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah 50 kali
5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
5.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan meja rapat 10 unit dan kursi rapat 20 unit	Pengadaan Lemari Arsip 4 unit	Pengadaan Sofa 1 set, kursi lipat 10 unit	Pengadaan Kursi biro 2 unit, kursi ½ biro 8 unit
5.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan untuk ruang rapat 3 unit (webcam, TV Led, Speaker basstone)	Pengadaan Peralatan kantor berupa laptop 2 unit	Pengadaan Peralatan kantor berupa laptop 2 unit	Pengadaan Peralatan kantor berupa laptop 2 unit
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
5.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat 600 surat	Jasa surat menyurat 600 surat	Jasa surat menyurat 600 surat	Jasa surat menyurat 600 surat
5.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, SDA dan listrik yang dibayarkan 3 rekening	Jasa komunikasi, SDA dan listrik yang dibayarkan 3 rekening	Jasa komunikasi, SDA dan listrik yang dibayarkan 3 rekening	Jasa komunikasi, SDA dan listrik yang dibayarkan 3 rekening
5.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa untuk 3 sub bidang urusan	Penyediaan jasa untuk 3 sub bidang urusan	Penyediaan jasa untuk 3 sub bidang urusan	Penyediaan jasa untuk 3 sub bidang urusan

5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
5.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 unit minibus	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 unit minibus	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 unit minibus	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 unit minibus
5.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 5 unit (2 laptop, 2 printer dan 1 ganset)	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 5 unit (2 laptop, 2 printer dan 1 ganset)	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 5 unit (2 laptop, 2 printer dan 1 ganset)	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 5 unit (2 laptop, 2 printer dan 1 ganset)
5.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung kantor 1 unit	Pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung kantor 1 unit	Pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung kantor 1 unit	Pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung kantor 1 unit
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan				
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				
5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Litbang bidang pemerintahan umum berupa Rekomendasi FGD sebanyak 3 laporan dan Rekomendasi tenaga ahli 12	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Litbang bidang pemerintahan umum berupa Rekomendasi FGD sebanyak 3 laporan dan Rekomendasi tenaga ahli 12	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Litbang bidang pemerintahan umum berupa Rekomendasi FGD sebanyak 3 laporan dan Rekomendasi tenaga ahli 12	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Litbang bidang pemerintahan umum berupa Rekomendasi FGD sebanyak 3 laporan dan Rekomendasi tenaga ahli 12

		laporan	laporan	laporan	laporan dan Rekomendasi tenaga ahli 12 laporan
5.05.02.2.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	-	-	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Litbang terkait kelembagaan dan tatalaksana daerah 2 laporan	-
5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	-	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Litbang terkait aparatur dan Reformasi Birokrasi Pemda Kab. Lampung Barat 2 laporan	-	-
5.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi terkait Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 1 laporan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi terkait Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 1 laporan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi terkait Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 1 laporan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi terkait Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 1 laporan
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Pelaksanaan diseminasi melalui jurnal (2 kali terbit dalam setahun)	Pelaksanaan diseminasi melalui jurnal (2 kali terbit dalam setahun)	Pelaksanaan diseminasi melalui jurnal (2 kali terbit dalam setahun)	Pelaksanaan diseminasi melalui jurnal (2 kali terbit dalam setahun)
5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	-	-	-	Rumusan rekomendasi atas penetapan peraturan daerah terkait geopark 1 laporan
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				
5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	-	Litbang berupa kajian terkait gender, pemberdayaan perempuan	-	-

			dan perlindungan anak 1 dokumen		
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Litbang berupa kajian terkait warisan budaya tak benda 1 dokumen	Pengembangan dan Pengelolaan Kebun Raya Liwa (43,26 ha)	Pengembangan dan Pengelolaan Kebun Raya Liwa (44,26 ha)	Pengembangan dan Pengelolaan Kebun Raya Liwa (45,26 Ha)
5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	-	-	Litbang berupa kajian terkait stunting pada anak 1 dokumen	-
5.05.02.2.02.08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	Litbang berupa kajian terkait bonus demografi 1 dokumen
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				
5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	Litbang berupa kajian terkait Peran Koperasi dalam mendukung permodalan UKM 1 dokumen	-	-
5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Litbang berupa kajian terkait Peningkatan PDRB Kabupaten Lampung Barat 1 dokumen	-	-	-
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Litbang berupa kajian terkait Integrasi Ternak kambing dengan kopi 1 dokumen	-	Kajian terkait pangan lokal yang akan direkomendasikan dalam pemenuhan gizi 1 dokumen	Litbang berupa kajian terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan 1 dokumen dan terkait peningkatan PDRB sector pertanian 1 dokumen

5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	-	-	-	Litbang berupa Kajian terkait teknologi budidaya ikan tawar yang bernilai ekonomis 1 dokumen
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	-	Litbang berupa pengembangan pengelolaan geopark Suoh 1 dokumen	Litbang berupa pengembangan pengelolaan geopark Suoh 1 dokumen	Litbang berupa pengembangan pengelolaan geopark Suoh 1 dokumen
5.05.02.2.03.08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	-	-	-	Litbang berupa Kajian terkait kemitraan konservasi dengan masyarakat 1 dokumen
5.05.02.2.03.06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Litbang berupa pengembangan pengelolaan geopark Suoh 1 dokumen	-	-	-
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Litbang berupa survey indeks kepuasan layanan infrastruktur 1 dokumen	Litbang berupa survey indeks kepuasan layanan infrastruktur 1 dokumen	Litbang berupa survey indeks kepuasan layanan infrastruktur 1 dokumen	Litbang berupa survey indeks kepuasan layanan infrastruktur 1 dokumen
5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	-	-	-	Litbang berupa Kajian terkait penataan sistem drainase kota Liwa 1 dokumen
5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	-	-	Litbang berupa Kajian terkait Implementasi pelaksanaan RTRW di Kab. Lampung Barat 1 dokumen	-
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan				

	Teknologi				
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Fasilitasi dan sosialisasi pelaksanaan IGA kepada 80 orang pamong Inovasi	Fasilitasi dan sosialisasi pelaksanaan IGA kepada 80 orang pamong Inovasi	Fasilitasi dan sosialisasi pelaksanaan IGA kepada 80 orang pamong Inovasi	Fasilitasi dan sosialisasi pelaksanaan IGA kepada 80 orang pamong Inovasi
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Fasilitasi dan sosialisasi pelaksanaan IGA kepada 80 orang pamong Inovasi	-	-	-
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui forum 100 orang	Pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui forum 100 orang	Pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui forum 100 orang	Pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui forum 100 orang

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Riset dan Inovasi tahun 2023-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD periode 2023 - 2026 dapat dilihat pada Tabel 7.1.

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Tiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
			Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	
1	Nilai SAKIP OPD	79,18 poin	79,25	79,50	79,75	80	80
2	Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Pemerintahan, Pembangunan, Inovasi Daerah dan Teknologi	80 laporan	22	24	24	24	94

	yang dapat ditindaklanjuti						
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

Selain indikator diatas, ada indikator tambahan yang menjadi tanggung jawab Badan Riset dan Inovasi Tambahan, seperti terlihat dalam tabel 7.2

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Tiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
			Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	
1	Jumlah KTI/Kajian yang dipublikasikan di Jurnal Ilmiah terakreditasi Nasional	-	-	1	1	1	3

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 — 2026 merupakan pedoman bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam jangka waktu Tahun 2023 - 2026. Rencana Strategis ini perlu didukung dengan penetapan anggaran dalam APBD Kabupaten Lampung Barat dan sumber dana lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Penelitian dan Pengembangan memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari Dinas/Intansi/Lembaga terkait serta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah, serta hambatan yang ditemukan apabila tidak tercapainya sasaran akan tergambar dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang akan disusun setiap tahunnya.

Akhirnya semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi sumber data dan informasi untuk penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang agar tercapai kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat yang lebih baik.

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s.d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Lokasi Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	79,18 poin	79,18 poin	79,25 poin	2.491.806.400	79,50 poin	2.458.567.500	79,75 poin	2.545.787.500	80 poin	2.509.287.500	80 poin	10.005.448.900		
		5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80 dokumen	20 dokumen	28 dokumen	23.400.000	25 dokumen	18.900.000	28 dokumen	23.400.000	25 dokumen	18.900.000	106 dokumen	84.600.000		
				Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun														
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
		5.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	3 dokumen	11 dokumen	7.000.000	8 dokumen	2.500.000	11 dokumen	7.000.000	8 dokumen	2.500.000	38 dokumen	19.000.000		
		5.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	4 dokumen	4.000.000		
		5.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	4 dokumen	4.000.000		
		5.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	4 dokumen	4.000.000		
		5.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.000.000	4 dokumen	4.000.000		
		5.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	1 laporan	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.000.000	4 laporan	4.000.000		
		5.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44 laporan	11 laporan	12 laporan	11.400.000	12 laporan	11.400.000	12 laporan	11.400.000	12 laporan	11.400.000	48 laporan	45.600.000		
		5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 orang/bulan	20 orang/bulan	20 orang/bulan	1.934.842.500	20 orang/bulan	1.934.842.500	20 orang/bulan	1.934.842.500	20 orang/bulan	1.934.842.500	80 orang/bulan	7.739.370.000		

[illegible]

		5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	1 paket	1 paket	174.480.000	1 paket	188.385.000	1 paket	201.105.000	1 paket	211.105.000	4 paket	775.075.000		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	4 paket	1 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		4 paket			
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 dokumen	4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		16 dokumen			
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 laporan	12 laporan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		48 laporan			
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		47 kali	50 laporan		50 laporan		50 laporan		50 laporan		200 laporan			
		5.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	1 paket	1 paket	2.725.000	1 paket	2.725.000	1 paket	2.725.000	1 paket	2.725.000	4 paket	10.900.000		
		5.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	1 paket	1 paket	38.295.000	1 paket	42.200.000	1 paket	44.920.000	1 paket	44.920.000	4 paket	170.335.000		
		5.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	16 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	3.960.000	4 dokumen	3.960.000	4 dokumen	3.960.000	4 dokumen	3.960.000	16 dokumen	15.840.000		
		5.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	48 laporan	12 laporan	12 laporan	4.500.000	12 laporan	4.500.000	12 laporan	4.500.000	12 laporan	4.500.000	48 laporan	18.000.000		
		5.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		47 kali	50 laporan	125.000.000	50 laporan	135.000.000	50 laporan	145.000.000	50 laporan	155.000.000	200 laporan	560.000.000		
																-		
		5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		0 unit	4 unit	72.000.000	4 unit	45.000.000	6 unit	100.000.000	4 unit	55.000.000		272.000.000		
		5.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0 unit	0 unit	-	0 unit	-	2 unit	50.000.000	0 unit	-	2 unit	50.000.000		
		5.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 unit	6 unit	32.000.000	2 unit	15.000.000	2 unit	20.000.000	2 unit	25.000.000	8 unit	92.000.000		
		5.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 unit	14 unit	40.000.000	2 unit	30.000.000	2 unit	30.000.000	2 unit	30.000.000	8 unit	130.000.000		
																-		
		5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	1 laporan	1 laporan	149.403.900	1 laporan	162.000.000	1 laporan	175.000.000	1 laporan	175.000.000	4 laporan	661.403.900		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 laporan	3 laporan	3 laporan		3 laporan		3 laporan		3 laporan		12 laporan			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	1 laporan	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		4 laporan			
		5.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	1 laporan	1 laporan	2.800.000	1 laporan	2.800.000	1 laporan	2.800.000	1 laporan	2.800.000	4 laporan	11.200.000		

		5.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	3 laporan	3 laporan	19.200.000	3 laporan	19.200.000	3 laporan	19.200.000	3 laporan	19.200.000	12 laporan	76.800.000		
		5.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	1 laporan	1 laporan	127.403.900	1 laporan	140.000.000	1 laporan	153.000.000	1 laporan	153.000.000	4 laporan	573.403.900		
		5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	32 unit	7 unit	8 unit	109.680.000	8 unit	81.440.000	8 unit	83.440.000	8 unit	86.440.000	32 unit	361.000.000		
		5.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	8 unit	2 unit	2 unit	53.240.000	2 unit	55.000.000	2 unit	57.000.000	2 unit	60.000.000	8 unit	225.240.000		
		5.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	5 unit	5 unit	6.440.000	5 unit	6.440.000	5 unit	6.440.000	5 unit	6.440.000	20 unit	25.760.000		
		5.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 unit	0 unit	1 unit	50.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	4 unit	110.000.000		
		5.05.02	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Pemerintahan, Pembangunan, Inovasi Daerah dan Teknologi yang dapat ditindaklanjuti	80 laporan	24 laporan	22 laporan	1.785.903.000	24 laporan	2.932.547.407	24 laporan	4.123.493.300	24 laporan	4.812.243.300	94 laporan	13.654.187.007		
		5.05.02.2.01	Penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	21 laporan	18 laporan	16 laporan	485.903.000	18 laporan	568.088.300	18 laporan	576.493.300	18 laporan	626.993.300	70 laporan	2.257.477.900		
		5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum	20 laporan	18 laporan	15 laporan	345.903.000	15 laporan	380.493.300	15 laporan	418.493.300	15 laporan	459.493.300	60 laporan	1.604.382.900		
		5.05.02.2.01.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	-	0 laporan	-	2 laporan	18.000.000	0 laporan	-	2 laporan	18.000.000		
		5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi		0 laporan	0 laporan	-	2 laporan	20.000.000	0 laporan	-	0 laporan	-	2 laporan	20.000.000		
		5.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		0 laporan	1 laporan	25.000.000	1 laporan	52.595.000	1 laporan	25.000.000	1 laporan	25.000.000	4 laporan	127.595.000		

		5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	8 laporan	2 laporan	2 laporan	115.000.000	2 laporan	115.000.000	2 laporan	115.000.000	2 laporan	115.000.000	8 laporan	460.000.000		
		5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan		0 laporan	0 laporan	-	0 laporan	-	0 laporan	-	1 laporan	27.500.000	1 laporan	27.500.000		
																-		
		5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		0 dokumen	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	1.344.459.107	1 dokumen	2.447.000.000	1 dokumen	2.565.250.000	4 dokumen	6.556.709.107		
		5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	-	1 dokumen	220.000.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	220.000.000		
		5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan	2 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	1.124.459.107	1 dokumen	2.205.000.000	1 dokumen	2.315.250.000	4 dokumen	5.844.709.107		
		5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan kesehatan	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	242.000.000	0 dokumen	-	1 dokumen	242.000.000		
		5.05.02.2.02.08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000		
																-		
		5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	10 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	850.000.000	3 dokumen	970.000.000	3 dokumen	1.050.000.000	3 dokumen	1.570.000.000	12 dokumen	4.440.000.000		
		5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		0 dokumen	0 dokumen	-	1 dokumen	220.000.000	0		0 dokumen	-	1 dokumen	220.000.000		
		5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		1 dokumen	1 dokumen	200.000.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	200.000.000		
		5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		1 dokumen	1 dokumen	200.000.000	0 dokumen	-	1 dokumen	200.000.000	1dokumen	240.000.000	3 dokumen	640.000.000		
		5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Kelautan dan Perikanan		0 dokumen	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	260.000.000	1 dokumen	260.000.000		
		5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Lingkungan Hidup		0 dokumen	1 dokumen	-	2 dokumen	600.000.000	1 dokumen	400.000.000	1 dokumen	420.000.000	1 dokumen	1.420.000.000		

		5.05.02.2.03.08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Kehutanan		0 dokumen	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000		
		5.05.02.2.03.06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral		0 dokumen	1 dokumen	300.000.000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	300.000.000		
		5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Pekerjaan Umum		1 dokumen	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	4 dokumen	600.000.000		
		5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman		0 dokumen	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	300.000.000		
		5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan		0 dokumen	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	300.000.000	0 dokumen	-	1 dokumen	300.000.000		
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah hasil laporan inovasi dan teknologi yang terverifikasi pengembangannya	12 laporan	3 laporan	4 laporan	250.000.000	4 laporan	50.000.000	4 laporan	50.000.000	4 laporan	50.000.000	16 laporan	400.000.000		
		5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	4 laporan	1 laporan	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	1 laporan	200.000.000	4 laporan	800.000.000		
		5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	4 laporan	1 laporan	1 laporan	200.000.000	0	-	0	-	0	-	1 laporan	200.000.000		
		5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	8 laporan	2 laporan	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000	4 laporan	200.000.000		

4.277.709.400

5.391.114.907

6.669.280.800

7.321.530.800

23.659.635.907